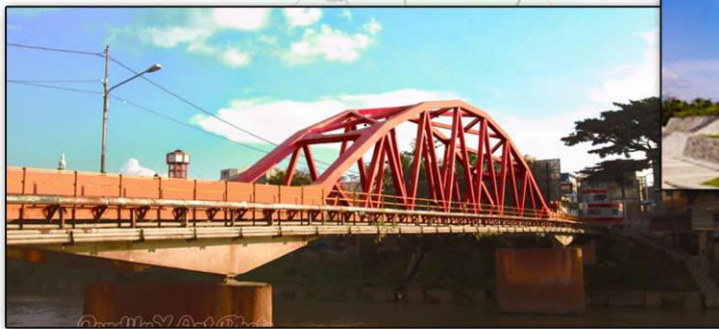


PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) 2015**



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Tahun 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten OKU tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten OKU 2016-2021. Melalui Laporan ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana kegiatan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komperhensif dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala atau permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga dalam perumusan kebijakan strategis perencanaan pembangunan kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2016 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016, kiranya dapat bermanfaat untuk pihak – pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT meridhoi segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang maju, sehat dan mandiri.

Baturaja, Maret 2017.

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Drs. H. KURYANA AZIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Aspek Strategis	4
1. Wilayah	4
2. Demografi	7
3. Perekonomian	8
4. Organisasi Perangkat Daerah	11
5. Isu-isu Strategis	15
6. Permasalahan Pembangunan	19
 BAB II : Perencanaan Kinerja	22
Perjanjian Kinerja	30
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja	33
1. Target dan Realisasi Kinerja	33
2. Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Target RPJMD	62
B. Realisasi Keuangan	83
 BAB IV : PENUTUP	90
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2016	
2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten OKU tahun 2016	

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Tahun 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten OKU tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten OKU 2016-2021. Melalui Laporan ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana kegiatan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komperhensif dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala atau permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga dalam perumusan kebijakan strategis perencanaan pembangunan kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2016 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016, kiranya dapat bermanfaat untuk pihak – pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT meridhoi segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang maju, sehat dan mandiri.

Baturaja, Maret 2017.

BUPATI OGAN KOMERING ULU



Drs. H. KURYANA AZIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Aspek Strategis	3
1. Wilayah	3
2. Demografi	5
3. Perekonomian	6
4. Organisasi Perangkat Daerah	10
5. Isu-isu Strategis	14
6. Permasalahan Pembangunan	16
 BAB II : Perencanaan Kinerja	 20
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 24
A. Capaian Kinerja	24
1. Target dan Realisasi Kinerja	24
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
B. Realisasi Keuangan	48
 BAB IV : PENUTUP	 54
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Lembar Hasil Reviu dari Inspektorat Kabupaten OKU	
2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2016	
3. Dokumen RKPD Kabupaten OKU Tahun 2016	
4. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten OKU tahun 2016	

Lampiran I : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor :
 Tanggal :

Indikator Kinerja Utama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2016 - 2021

No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Sumber Data	SKPD Penanggung Jawab
Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih (Good Government & Clean Governance)						
1	Terlayannya Administrasi Pemerintahan yang baik	1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda OKU
		2.	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)	Hasil Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Bagian Organisasi Setda OKU
		3.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	SKPD Pelaksana SKM	Bagian Organisasi Setda OKU
		4	Jumlah Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti			Inspektorat Kab. OKU
2	Meningkatnya Kinerja Keuangan	5	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah.	BPK	BPKAD Kab. OKU
Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan						
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	6	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk	BPS	Dinas Kesehatan Kab. OKU

No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Sumber Data	SKPD Penanggung Jawab
		7	Prosentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi		Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. OKU
		8	Angka Partisipasi Sekolah	Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.		Dinas Pendidikan Kab OKU
		9	Angka Putus Sekolah	Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun		Dinas Pendidikan Kab OKU
		10	Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas		Dinas Pendidikan Kab OKU
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$		Dinas Tenaga Kerja Kab. OKU
Misi III : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumberdaya Lokal						
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	12	Prosentase Desa yang telah memenuhi/Swasembada Pangan	$\frac{\text{Jumlah Desa Berswasembada}}{\text{Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100$		Dinas Pertanian

No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Sumber Data	SKPD Penanggung Jawab
		13	Angka Kemiskinan		BPS	Dinas Sosial Kab. OKU
		14	Prosentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100$		Dinas Koperasi & UKM Kab. OKU
5	Tumbuhnya Pelaku Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	15	Jumlah Usaha Kecil & Menengah yang Aktif			Disperindag Kab. OKU
Misi IV : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Publik Berdimensi Wilayah						
6	Terbangunnya Infrastruktur Strategis	16	Rasio Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	$= \frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan kabupaten di daerah Tersebut}} \times 100\%$	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
		17	Rasio Pemukiman Layak Huni	$\frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}}$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		18	Rasio Penanganan Sampah	$\frac{\text{Volume Sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$		Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran II : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor :
 Tanggal :

Tabel Penetapan Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat	10	8	6	6	5	5	Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda OKU
2	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)	Skala	C	C	C	B	B	B	Bagian Organisasi Setda OKU
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	%	70	75	80	85	90	95	Bagian Organisasi Setda OKU
4	Jumlah Temuan Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti								
5	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD Kab. OKU
6	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,64	67,66	67,67	67,69	67,70	67,71	Dinas Kesehatan Kab. OKU
7	Prosentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	%							Dinas Kesehatan Kab. OKU

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
8	Angka Partisipasi Sekolah	%							Dinas Pendidikan Kab. OKU
9	Angka Putus Sekolah	%							Dinas Pendidikan Kab. OKU
10	Angka Melek Huruf	%	98,99	99,19	99,40	99,8	100	100	Dinas Pendidikan Kab. OKU
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,21	3,80	3,39	3,34	3,15	3,15	Dinas Tenaga Kerja Kab. OKU
12	Prosentase Desa yang telah memenuhi/ Swasembada Pangan	%							Dinas Pertanian Kab. OKU
13	Angka Kemiskinan	%	10,47	9,65	9,07	8,51	7,96	7,41	Dinas Sosial Kab. OKU
14	Prosentase Koperasi Aktif	%	86	90	95	97	99	99	Dinas Koperasi & UKM Kab. OKU
15	Jumlah Usaha Kecil & Menengah	Unit	20 / 15 / 2	20 / 15 / 2	20 / 15 / 2	20 / 15 / 2	20 / 15 / 2	20 / 15 / 2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. OKU
16	Rasio Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	70,15	75,32	78,15	80,46	83,13	85	Dinas PU dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
17	Rasio Pemukiman Layak Huni	%							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Rasio Penanganan Sampah	%	80	80	85	85	90	90	Dinas Lingkungan Hidup

Misi I : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Sumber Data
1	Peningkatan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar	$APK_h^t = \frac{APK_h^t}{APK_{h,a}^t} \times 100$	%	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni	$APK_{15+}^t = \frac{APK_{15+}^t}{APK_{15+}^t} \times 100$	%	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS Se-Kabupaten}}{\text{Jumlah Seluruh APS Se-Kabupaten}} \times 100\%$	%	Dinas Pendidikan
		Rata - rata Lamanya Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	Dinas Pendidikan
		Rata - rata Melek Huruf	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$	%	Dinas Pendidikan
2	Peningkatan Kualitas Kelulusan	Angka Kelulusan	$\frac{\text{Jumlah Lulusan Pada Jenjang}}{\text{Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada jenjang di tahun sebelumnya}} \times 100\%$	%	Dinas Pendidikan
3	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	%	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	$IMR = \frac{\text{Jumlah Kematian bayi Umur <1 Tahun}}{\text{Jumlah kelahiran bayi Hidup}} \times 1000$	Anak	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 1000 KH	$MMR = \frac{\text{Jumlah Kematian karena Kehamilan, Persalinan, Masa Nifas atau komplikasi-komplikasinya selama 1 periode}}{\text{Jumlah kelahiran Hidup Selama Periode yang sama}} \times 100.000$	Jiwa	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Gizi Buruk	$= \frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$	%	Dinas Kesehatan

	Misi I : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
4	Akses Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu	$= \frac{Jumlah\ Puskesmas, Poliklinik, Pustu}{Jumlah\ Penduduk} \times 1000$	Unit/ Penduduk	Dinas Kesehatan
		Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	$= \frac{Jumlah\ Tenaga\ Medis}{Jumlah\ Penduduk} \times 1000$	Medis/ Penduduk	Dinas Kesehatan
	Misi 2: Membangun Ekonomi Kerakyatan				

5	Membangun Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Prosentase Koperasi Aktif	$= \frac{Jumlah\ Koperasi\ aktif}{Jumlah\ Seluruh\ Koperasi} \times 100$	%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Jumlah Pasar Tradisional	Jumlah Pasar Tradisional	Unit	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Misi 3: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Antara Desa dan Kota					
6	Infrastruktur Kondisi Baik	Rasio Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$= \frac{Panjang\ jalan\ Kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik}{Panjang\ seluruh\ Jalan\ kabupaten\ di\ daera\ Tersebut} \times 100\%$	%	Dinas PU CK, Pengairan Dan Tata Ruang
		Luas Area Sawah yang dialiri Irigasi	$= \frac{Panjang\ Saluran\ Irigasi}{Luas\ Sawah\ yang\ dialiri\ irigasi} \times 100\%$	Ha	Dinas Pertanian
		Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	$= \frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Pengguna\ Air\ Bersih}{Jumlah\ Seluruh\ Ruma\ tangga} \times 100\%$	%	Dinas PU CK, Pengairan Dan Tata Ruang

7	Pemerataan Sarana Dan Prasarana Publik	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Puskesmas	Jumlah Puskesmas	Unit	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Pasar Lokal	Unit	Dinas

		Yang Memiliki Pasar Lokal			Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
8	Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Penanganan Sampah	$= \frac{Volume\ sampah\ yang\ ditangani}{Volume\ Produksi\ sampah} \times 100\%$	%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Prosentase Perusahaan Yang Memiliki AMDAL	$= \frac{Jumlah\ Perusahaan\ yang\ memiliki\ AMDAL}{Jumlah\ Seluruh\ Perusahaan\ Wajib\ AMDAL} \times 100\%$	%	Badan Lingkungan Hidup
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih					
9	Pemerintahan Responsif, Transparan , Akuntabel	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Bagian Adm Pemerintahan Umum Setda Kab OKU
		Penerapan E-Government	$= \frac{Jumlah\ SKPD\ yang\ melaksanakan\ E-Government}{Jumlah\ Seluruh\ SKPD} \times 100\%$	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Hasil Penilaian LKjIP	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah		Bagian Organisasi Setda Kab OKU
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Oleh BPK		BPKAD
10	Pelayanan Publik Semakin Baik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah daerah	%	Bagian Organisasi Setda Kab OKU

A. Latar Belakang.

Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mewujudkan “*good governance*” (Pemerintahan yang baik), diperlukan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, selaku pemberi amanat dan pemilik kekuasaan serta kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna serta berhasilguna. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Secara garis besar, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten OKU 2016 berisi informasi rencana dan capaian kinerja selama 2016, yang didasari pada amanat perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan kemudian diubah dengan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu pula penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2016 juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015, berpedoman pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2010- 2016. Dan merupakan tahun peralihan/transisi ke RPJMD Periode 2016-2021.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dan telah dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah kabupaten OKU untuk meningkatkan kinerjanya

C. ASPEK STRATEGIS

1. Wilayah.

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 dengan luas 13.661 Km². Namun dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, luas Kabupaten Ogan Komering Ulu berubah menjadi 4.797,06 Km² karena telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni:

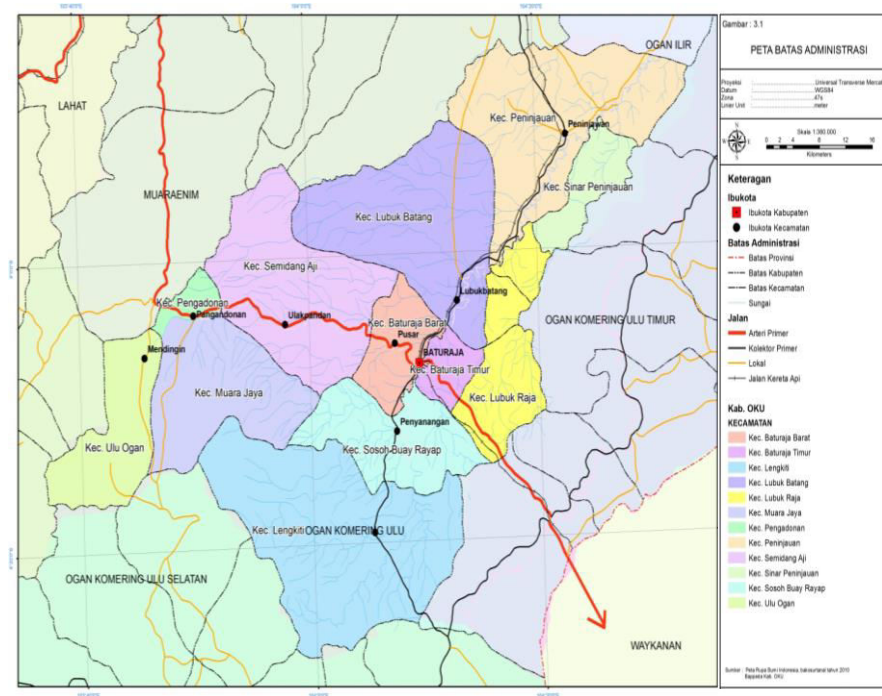
- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Ibukota di Martapura;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Ibukota di Muaradua;
- c. Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Ibukota di Baturaja.

Kondisi geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada 103°40' – 104°33' BT dan 03°45' – 04°55' LS atau terletak pada jalur Lintas Tengah Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu serta Provinsi Jambi. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan; |
| Sebelah Timur | : Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan; |
| Sebelah Selatan | : Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan; |
| Sebelah Barat | : Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. |

Untuk lebih jelasnya, kondisi geografis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dalam Gambar Peta dibawah ini.

Gambar 1
Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu



Dari aspek administrasi pemerintahan, Kabupaten OKU terdiri atas 13 (tiga belas) Kecamatan, 143 desa dan 14 Kelurahan. Adapun Kecamatan termuda yang ada di Kabupaten OKU adalah Kecamatan Kedaton Peninjau Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjau Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tabel. I. 1
Jumlah Desa dan Kelurahan
Menurut Kecamatan dalam Kabupaten OKU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1.	Baturaja Barat	1	5	6
2.	Baturaja Timur	4	9	13
3.	Sosoh Buay Rayap	11	-	11
4.	Pengandonan	12	-	12

5.	Peninjauan	16	-	16
6.	Semidang Aji	21	-	21
7.	Ulu Ogan	7	-	7
8.	Lubuk Batang	15	-	15
9.	Lengkiti	22	-	22
10.	Lubuk Raja	7	-	7
11.	Sinar Peninjauan	16	-	16
12.	Muara Jaya	7	-	7
13.	Kedaton Peninjauan Raya	8		8
Total		147	14	161

Tabel diatas menunjukan jumlah total keseluruhan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 161 Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan merupakan faktor pendukung yang memegang peranan penting untuk kesuksesan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Demografi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2016, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 352.366 jiwa (*database* kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU). Jumlah penduduk per-kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. I. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten OKU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Keterangan
1	Sosoh Buay Rayap	13.593	
2	Pengandonan	10.223	

3	Peninjauan	44.787	
4	Muara Jaya	7.217	
5	Baturaja Barat	35.619	
6	Baturaja Timur	94.644	
7	Ulu Ogan	9.127	
8	Semidang Aji	27.285	
9	Lubuk Batang	29.968	
10	Lengkiti	28.382	
11	Sinar Peninjauan	22.098	
12	Lubuk Raja	29.423	
13	Kedaton Peninjauan Raya*	-	
JUMLAH		352.366	

Sumber : Berdasarkan Database Kependudukan Nasional, Kementerian Dalam Negeri RI

Per-Semester II Tahun 2015

*Data Penduduk Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya masih tergabung di dalam Jumlah Penduduk Kecamatan Peninjauan yang merupakan Kecamatan Induk

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak merata. Kecamatan Baturaja Timur merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat diantara 13 (tiga belas) kecamatan yang ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan ini antara lain letak Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan tersebut.

3. Perekonomian.

3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Indikator ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh suatu daerah.

Perekonomian Ogan Komering Ulu pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Ogan Komering Ulu tahun 2015 mencapai 3,05 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 3,67 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,28 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Ogan Komering Ulu tahun 2014 mencapai 3,67 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Pendidikan sebesar 18,48 persen. Sedangkan seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalan.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencatat sebesar 10,61 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,84 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 7,99 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,46 persen, kategori Real Estat sebesar 6,63 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 5,96 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,04 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,85 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 4,62 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 4,07 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,59 persen, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,22 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas mencatat sebesar 0,51 persen, kategori Konstruksi sebesar 0,09 persen. Sedangkan kategori Pertambangan dan Penggalan mencatat pertumbuhan negatif sebesar 1,73 persen.

Secara rinci laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel I.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2015

	Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	6.32	5.54	3.74	2.22
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	(3.76)	(4.98)	(4.76)	(1.73))
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	7.76	8.08	7.53	5.96
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	12.38	7.39	9.58	0.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	6.35	4.52	5.19	5.04
F	Konstruksi/Construction	11.68	9.24	4.32	0.09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7.88	6.03	4.64	3.59
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	7.83	7.24	7.48	11.28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	8.49	2.92	5.50	9.84
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8.37	6.12	7.93	8.56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	10.37	8.29	3.87	4.85
L	Real Estat/Real Estate Activities	9.43	8.83	6.82	6.63
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	6.92	7.89	6.03	4.62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.97	0.73	5.74	10.61
P	Jasa Pendidikan/Education	5.97	9.39	18.48	7.99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8.02	5.38	8.82	7.46
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1.08	2.27	3.09	4.07
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5.26	4.46	3.67	3.05

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : BPS OKU 2016

3.2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat) variabel pokok yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil (*adjusted*). Nilai IPM berkisar antara 0-1.

Dari hasil IPM Metode Baru diperoleh IPM di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tahun 2015 adalah sebesar 67,18.

Gambar 2
Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan
Tahun 2011-2015

Kabupaten / Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
01. Ogan Komering Ulu	64,62	65,09	65,51	66,21	67,18
02. Ogan Komering Ilir	61,68	62,29	63,52	63,87	64,73
03. Muara Enim	62,82	63,34	64,34	65,02	65,82
04. Lahat	62,93	63,66	64,15	64,52	65,25
05. Musi Rawas	60,63	61,37	62,23	63,19	64,11
06. Musi Banyuasin	62,56	63,27	64,18	64,93	65,76
07. Banyuasin	61,04	61,69	62,42	63,21	64,15
08. OKU Selatan	59,74	60,63	61,58	61,94	62,57
09. OKU Timur	64,27	65,18	66,09	66,74	67,17
10. Ogan Ilir	62,47	63,03	63,64	64,49	65,35
11. Empat Lawang	61,86	62,30	62,74	63,17	63,55
12. Penukal Abab Lematang Ilir	59,69	59,89	60,83
13. Musi Rawas Utara	60,56	61,34	62,32
14. Palembang	74,08	74,74	75,49	76,02	76,29
15. Prabumulih	70,32	70,95	71,87	72,20	73,19
16. Pagar Alam	62,71	63,33	64,14	64,75	65,37
17. Lubuk Linggau	71,62	72,04	72,55	72,84	73,17
Sumatera Selatan	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu

Source : BPS – Statistics of Ogan Komering Ulu Regency

4. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

4.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditandai dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dibentuk organisasi perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berfungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari 1 Sekretaris, 3 Asisten, dan 12 Bagian
2. Sekretariat DPRD Kabupaten, terdiri dari 1 sekretaris dan 3 bagian.
3. Dinas Daerah sebanyak 16 Dinas.
4. Lembaga Teknis Daerah sebanyak 14, yang terdiri atas 10 Badan dan 4 Kantor.

Untuk mengetahui besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. I. 4
Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten OKU

SEKRETARIAT DAERAH/ SEKRETARIAT DPRD	Dinas	Badan	LTD	Ket
SEKRETARIAT DAERAH 1. SEKRETARIS DAERAH 1. ASISTEN I (BIDANG PEMERINTAHAN)	1. DINAS PENDIDIKAN 2. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBDY DAN PARWSTA 3. DINAS KESEHATAN	1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3. BADAN PENDIDIKAN &	1. INSPEKTORAT 2. KANTOR PERPUST, ARSIP DAN DOKUMENTSI 3. KANTOR PENANGGULA NGAN BAHAYA	

2. ASISTEN II (BID. PEMB & KESRA)	4. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS.	PELATIHAN	KEBAKARAN	
3. ASISTEN III (BID. ADM UMUM & KEU)	5. DINAS PERHUBNGAN	4. BADAN LINGKUNGAN HIDUP	4. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	
1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	6. DINAS KOMINFO	5. BADAN KESBANGPOL	5. SATUAN POL PAMONG PRAJA	
2. BAGIAN HUKUM	7. DINAS KEPEND.& PENC. SIPIL	6. BADAN PEMBERDAYAA N MASY DAN PEMDES	6. SEKRETARIAT KORPRI	
3. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	8. DINAS PU. BINA MARGA	7. BADAN KB DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	7. RSUD IBNU SOETOWO	
4. BAGIAN ADM. KEMASYARAKTAN	9. DINAS PU. CK, PENGAIRAN & TATA RUANG	8. BADAN PENANAMAN MODAL	8. BPBD	
5. BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	10. DINAS PERINDAG KOP & UKM	9. BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGA N DAN STATISTK		
6. BAGIAN ADM. KESRA	11. DINAS PERTANIAN TP & HORT	10. BADAN KETAHANAN PANGAN		
7. BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	12. DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN	10. BADAN PENGL KEU & ASSET		
8. BAGIAN ADM. SUMBER DAYA ALAM	13. DINAS PERKEB & KHTANAN	11. BADAN PENYULUH PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN.		
9. BAGIAN ORGANISASI	14. DINAS PERTAMB. & ENERGI			
10. BAGIAN UMUM	15. DINAS PENDAPATAN DAERAH			
11. BAGIAN PERLENGKAPAN	16. DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN			
12. BAGIAN KEUANGAN	17. DINAS SOSIAL			
SEKRETARIAT DPRD				
1. SEKRETARIS DPRD				
1. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL				
2. BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM				
3. BAGIAN KEUANGAN				

Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan unsur Staf Pemerintah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Kabupaten. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dinas-dinas Kabupaten adalah unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Disamping dinas kabupaten yang berfungsi sebagai unsur pelaksana, maka sebagai organisasi yang menjadi bagian dari perangkat daerah dengan fungsi melaksanakan urusan tertentu, maka dibentuk juga lembaga teknis daerah. Lembaga Teknis Kabupaten adalah unsur pendukung tugas Bupati yang berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit. Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdiri dari 9 Badan, 3 Kantor, Inspektorat, dan Rumah Sakit Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4.2. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Dari aspek administrasi pemerintahan, Kabupaten OKU terdiri atas 13 (tiga belas) Kecamatan, 143 desa dan 14 Kelurahan. Adapun Kecamatan termuda yang ada di Kabupaten OKU adalah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tabel. I. 5
Jumlah Desa dan Kelurahan
Menurut Kecamatan dalam Kabupaten OKU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1.	Baturaja Barat	1	5	6
2.	Baturaja Timur	4	9	13
3.	Sosoh Buay Rayap	11	-	11
4.	Pengandonan	12	-	12
5.	Peninjauan	16	-	16
6.	Semidang Aji	21	-	21
7.	Ulu Ogan	7	-	7
8.	Lubuk Batang	15	-	15
9.	Lengkiti	22	-	22
10.	Lubuk Raja	7	-	7
11.	Sinar Peninjauan	16	-	16
12.	Muara Jaya	7	-	7
13.	Kedaton Peninjauan Raya	8		8
Total		147	14	161

Tabel diatas menunjukan jumlah total keseluruhan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 161 Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan merupakan faktor pendukung yang memegang peranan penting untuk kesuksesan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. ISU-ISU STRATEGIS

5.1. Reorganisasi Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung dengan kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Perubahan yang cukup signifikan saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula diatur dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten, setidaknya terdapat 2 (dua) urusan yang kewenangan semula berada di kabupaten, diambil alih oleh pemerintah provinsi, yaitu urusan pemerintah dibidang kehutan dan pertambangan.

Pada sisi lain, berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berdampak positif bagi pemerintah kabupaten. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, penataan organisasi perangkat daerah menganut prinsip besaran organisasi mengikuti beban kerja yang secara nyata ada di daerah. Dalam waktu dekat, akan terjadi reorganisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Diharapkan penataan organisasi berdasarkan kondisi nyata yang teradapat pada suatu daerah, akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas organisasi, baik dari segi pembiayaan maupun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penataan organisasi perangkat daerah juga didukung dengan perubahan dalam penataan kompetensi aparatur. Selaras dengan maksud dan tujuan dari penataan organisasi perangkat daerah, juga akan dilaksanakan penataan aparatur daerah. Penataan aparatur pemerintah sudah dimulai sejak diundangkannya undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengisian jabatan pada level puncak yaitu Jabatan Tinggi setara dengan eselon I dan II, sudah harus dimulai dengan menggunakan sistem terbuka.

Perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menuntut kesiapan dari semua aparatur daerah. Perubahan dalam kewenangan daerah, yang diikuti dengan pelaksanaan reorganisasi perangkat daerah serta perubahan dibidang kepegawaian akan berdampak pada fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Semua aspek yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut harus benar-benar dipersiapkan secara cermat. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi, akan berdampak kepada masyarakat luas, dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah, dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, disertai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan serta Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berjalan efektif per 1 Januari 2017.

5.2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sejalan dengan perbaikan tatakelola pemerintah yang ditandai dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelayanan publik mendapatkan perhatian yang sangat besar. Diberlakukannya undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengubah pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berangkat dari kondisi masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa pelayanan publik buruk, memakan waktu yang lama,

dan biaya besar menimbulkan sikap yang apatis masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten OKU berusaha mengubah paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan public agar mencapai pelayanan yang prima, sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dengan terwujudnya pelayanan yang prima, akan dicapai manfaat investasi, lapangan kerja baru serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk sektor pelayanan administrasi selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU, adalah dengan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Badan yang akan dibentuk merupakan penggabungan antara Badan Penanaman Modal dan Kantor Perizinan Terpadu. Dengan penggabungan akan dapat dicapai efisiensi dan efektifitas, baik dari sumberdaya manusia, pembiayaan serta adanya satu kesatuan antara investasi dan proses pemberian izin. Lembaga itu juga nantinya diharapkan akan memperbaiki prosedur dan sistem pelayanan, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima akan dapat tercapai.

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sudah selesai dibahas dan disetujui oleh DPRD Kabupaten OKU.

6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.

6.1. Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di kabupaten Ogan Komering Ulu masih relatif besar. Data pada tahun 2013 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebesar 12,31 % dari jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu, artinya masih terdapat 48,525. org berada tingkat kemiskinan. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 11,19 %. Kondisi tersebut

dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan dari semula Rp. 306.038 pada tahun 2012 menjadi Rp. 308.219 pada tahun 2013.

Tabel 1.6

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di
Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2010–2014

Tahun	(rupiah)	Jumlah (000 jiwa) Total	Persentase
2010		39,90	12,28
2011		38,33	11,58
2012		37,60	11,19
2013		42,00	12,31
2014		41,41	11,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selain itu, bertambahnya jumlah angka kemiskinan dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan yang paling dominan pada saat ini adalah turunya harga komoditas karet. Harga jual karet pada tingkat petani hanya berkisar antara Rp../kg- sampai dengan Rp../kg turun sangat drastis dari tahun 2013 yang berkisar Rp../kg hingga Rp../kg. Potensi perkebunan karet yang semula menjadi primadona masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan jumlah petani sebanyak 86.592.org atau sekitar 24,63.% dari jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat ini banyak yang terbengkalai dan tidak produktif lagi.

6.2. Ketahanan Pangan.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu relatif tinggi. Tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,11.% pertahun. Pertumbuhan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam upaya memenuhi ketersediaan dan ketercukupan pangan.

Untuk menjamin ketersediaan pangan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat melakukan upaya dengan memanfaatkan ketersediaan lahan untuk pertanian yang masih cukup tersedia. Luas lahan persawahan basah sebesar 11,862.ha dan lahan kering seluas 124,787.ha masih dapat

dikembangkan dan dioptimalkan untuk produksi tanaman pokok seperti padi, jagung dan kedelai.

Selain upaya menjamin ketersediaan bahan makanan utama, maka untuk meningkatkan gizi masyarakat perlu juga diupayakan produksi makanan hewani, melalui pengembangan sektor peternakan dan perikanan. Kondisi alamiah kabupaten Ogan Komering Ulu yang banyak dilewati sungai, dan berkembangnya sektor perkebunan sawit, dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat khususnya kebutuhan daging dan ikan. Peluang untuk meningkatkan usaha peternakan, dapat ditempuh melalui kerja sama dengan pihak pengelola perkebunan sawit dengan sistem integrasi sawit dan sapi.

6.3. Infrastruktur Transportasi.

Infrastruktur transportasi jalan merupakan sarana perhubungan yang sangat vital bagi masyarakat. Jalan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari jalan negara sepanjang 83,195.km mulai dari perbatasan Kabupaten OKU Timur sampai dengan Kabupaten Muara Enim. Jalan negara ini merupakan jalur tengah trans sumatera. Kondisi jalan tersebut pada saat ini di beberapa titik sudah sangat rusak, setidaknya hampir disepanjang Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami kerusakan yang parah dengan kondisi yang berlubang dalam dan hancur. Banyaknya kendaraan jenis truk bertonase besar yang melewati serta kurangnya perawatan menjadi penyebab utama kerusakan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan, disisi lain keperdulian pemerintah pusat untuk memperbaiki belum ada, sehingga kerusakan tersebut berlangsung lama.

Disamping jalan negara, terdapat jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jalan provinsi menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan kabupaten dan kota sekitar yang berbatasan langsung. Pada saat ini kerusakan terparah terdapat pada ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara

Enim di jalur Baturaja ke arah Kota Prabumulih. Kerusakan dengan kondisi berlubang yang dalam dan hampir merata sudah berlangsung cukup lama, hampir 4 (empat) tahun ini. Belum ada tanda-tanda akan diperbaiki, mengakibatkan meningkatnya biaya produksi dan mengurangi banyak keuntungan bagi masyarakat dalam melakukan usaha.

Jalan kabupaten sendiri sepanjang 1.147.227.km mengalami kondisi yang sama. Sekitar lebih kurang 30 % dari panjang jalan kabupaten mengalami kerusakan. Akses jalan ini merupakan sarana utama yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam lalu lintyas barang dan orang. Sangat dibutuhkan kondisi jalan yang terawat dan terjaga dengan baik, sehingga benar-benar dapat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada :

1. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015*
2. *Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2015*
3. *Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKPD) Tahun 2016*
4. *Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016*

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencapainya dalam Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun

berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan Kinerja.

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel II. 2
Perjanjian Kinerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Pemerintahan Responsif, Transparan, Akuntabel	1	Ketersediaan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat	1
		2	Penerapan e-Government	%	80
		3	Jumlah Regulasi Partisipasi Publik	paket	42
2	Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta	4	Pola Kemitraan	paket	3
		5	Jumlah Peraturan yang mendukung Iklim Usaha	paket	2
3	Pemerintahan yang Berkualitas, Efektif dan Efisien	6	Hasil Penilaian LKjIP	huruf	A
		7	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	opini	WTP
4	Pelayanan Publik yang Semakin Baik	8	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	%	75
5	Infrastruktur Kondisi Baik	9	Rasio Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	75
		10	Luas Area sawah yang dialiri irigasi	ha	1.825
		11	Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	%	30
6	Pembangunan Berwawasan Lingkungan	12	Rasio Penanganan Sampah	%	90
		13	Persentase Perusahaan yang memiliki AMDAL	%	100
7	Peningkatan Sarana Prasarana Publik	14	Jumlah Rambu jalan		
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	15	Jumlah Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Perda/ perbup	1
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	16	Data Profil Desa	desa	157
10	Pemerataan Sarana Prasarana Publik	17	Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas	kec	13
		18	Jumlah kecamatan yang memiliki Pasar Lokal	kec	6

11	Pengembangan Wilayah Perbatasan	19	Prosentase Penetapan Batas	% / kec	70 / 2
12	Penanggulangan Kesejahteraan Sosial	20	Angka Kemiskinan	%	10.29
13	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	21	Indeks Pembangunan Manusia	poin	73.58
14	Nilai tambah produk unggulan wilayah	22	PDRB (atas dasar harga konstan)	Rp. Juta	3.394.016
		23	Nilai tambah pertanian	Rp. Juta	988.232
		24	Nilai tambah pertambangan dan energi	Rp. Juta	632.592
		25	Nilai tambah pengolahan	Rp. Juta	321.369
		26	Nilai tambah listrik, gas dan air bersih	Rp. Juta	7.157
		27	Nilai tambah bangunan	Rp. Juta	248.801
		28	Nilai tambah perdagangan, hotel dan restoran	Rp. Juta	593.760
		29	Nilai tambah pengangkutan dan komunikasi	Rp. Juta	79.350
		30	Nilai tambah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	Rp. Juta	141.878
		31	Nilai tambah jasa-jasa	Rp. Juta	336.803
15	Simpul Perdagangan dan Daya Saing Produk	32	Jumlah Pasar Tradisional	unit	30
16	IPTEK untuk Pengelolaan Sumber Daya	33	Jumlah Studi/Penelitian	paket	3
		34	Penerapan IPTEK pada usaha ekonomi rakyat	paket	3
17	Ketahanan Pangan, Diversifikasi dan Kesejahteraan Petani	35	Ketersediaan Pangan Utama	ton	140,534.10
		36	Skor Pola Pangan Harapan	poin	92.40
		37	Pengeluaran RT non pangan	Rp. Juta	703,211
		38	Rata-rata Pengeluaran RT perbulan	Rp. Juta	1.541.988
18	Peningkatan Akses Kesehatan	39	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	80,4
		40	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	KH	24 per 1.000
		41	Angka kematian ibu per 100.000 KH	KH	118 per 100.000
		42	Prevalensi Gizi Buruk	%	≤ 1
		43	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk		
			- Puskesmas	unit/penduduk	12,32
			- Poliklinik	unit/penduduk	123.30
			- Pustu	unit/pendu	36.90

				duk	
		44	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk	medis/ penduduk	111.00
19	Peningkatan Akses Pendidikan	45	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
			- SD	%	100
			- SMP	%	100
			- SMA	%	100
		46	Angka Partisipasi Murni (APM)		
			- SD	%	100
			- SMP	%	100
			- SMA	%	100
		47	Angka Kelulusan (AK)		
			- SD	%	100
			- SMP	%	100
			- SMA	%	100
		48	Angka Putus Sekolah	%	0
		49	Angka Melek Huruf	%	100
		50	Rata-rata lamanya Sekolah	tahun	9.10
20	Peningkatan Budaya Baca Masyarakat	51	Pengunjung Perpustakaan Daerah perbulan	orang	400

Secara keseluruhan penjabaran dari program/kegiatan sesuai dengan prioritas program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2016, dalam operasionalnya dibutuhkan anggaran. Untuk itu jumlah anggaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2016 yang termasuk dalam belanja langsung adalah sebesar Rp. (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, disajikan capaian kinerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016. Diuraikan hasil pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja sasaran (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

1. Target dan Realisasi Kinerja.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang berdasarkan RPKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016. Dalam RPKPD Kabupaten OKU tahun 2016, terdapat 10 sasaran dengan indikator sebanyak 51. Pencapaian target dan realisasinya tahun 2016 digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Pemerintahan Responsif, Transparan, Akuntabel	1	Ketersediaan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	8	
		2	Penerapan e-Government	80	42%	52%
		3	Jumlah Regulasi Partisipasi Publik	42		
2	Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta	4	Pola Kemitraan	3		
		5	Jumlah Peraturan yang mendukung Iklim Usaha	2		
3	Pemerintahan yang Berkualitas, Efektif dan Efisien	6	Hasil Penilaian LKjIP	A	C	
		7	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	WTP	dalam proses penilaian	-
4	Pelayanan Publik yang Semakin Baik	8	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	75	77.8	103,7
5	Infrastruktur Kondisi Baik	9	Rasio Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	75	70.14 %	93,52%
		10	Luas Area Sawah yang dialiri irigasi	1.825	880 ha	48,22
		11	Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	30		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Realisasi
6	Pembangunan Berwawasan Lingkungan	12	Rasio Penanganan Sampah	90	
		13	Persentase Perusahaan yang memiliki AMDAL	100	44%
7	Peningkatan Sarana Prasarana Publik	14	Jumlah Rambu jalan	1457	1572 107,9
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	15	Jumlah Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	1 Perbup 100%
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	16	Data Profil Desa	157	53 33.76 %
10	Pemerataan Sarana Prasarana Publik	17	Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas	13	12 92%
		18	Jumlah kecamatan yang memiliki Pasar Lokal	6	13 216%
11	Pengembangan Wilayah Perbatasan	19	Prosentase Penetapan Batas	70 / 2	
12	Penanggulangan Kesejahteraan Sosial	20	Angka Kemiskinan	10.29	11.96 *
13	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	21	Indeks Pembangunan Manusia	73.58	67.18** 91%

* Angka dari BPS OKU tahun 2014

**Angka Dari BPS OKU Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	% Realisasi
14	Nilai tambah produk unggulan wilayah	22	PDRB (atas dasar harga konstan)	3.394.016	8.230.963,1***	243
		23	Nilai tambah pertanian	988.232	2.386.890,1***	242
		24	Nilai tambah pertambangan dan energi	632.592	1.239.578,0***	196
		25	Nilai tambah pengolahan	321.369	1.203.076,0***	374
		26	Nilai tambah listrik, gas dan air bersih	7.157	5.878,2***	82
		27	Nilai tambah bangunan	248.801	854.388,5***	343
		28	Nilai tambah perdagangan, hotel dan restoran	593.760	550.605,0***	93
		29	Nilai tambah pengangkutan dan komunikasi	79.350	347.242,8***	438
		30	Nilai tambah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	141.878	624.818,75***	440
		31	Nilai tambah jasa-jasa	336.803	1.030.708,7***	306
15	Simpul Perdagangan dan Daya Saing Produk	32	Jumlah Pasar Tradisional	30	52	173,3
16	IPTEK untuk Pengelolaan Sumber Daya	33	Jumlah Studi/Penelitian	3		
		34	Penerapan IPTEK pada usaha ekonomi rakyat	3	1	33,33

***Angka Sangat Sementara dari BPS OKU tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	% Realisasi
17	Ketahanan Pangan, Diversifikasi dan Kesejahteraan Petani	35	Ketersediaan Pangan Utama	140,534.10	8.873.30 ton	6,31
		36	Skor Pola Pangan Harapan	92.40	65.9 poin	71,32
		37	Pengeluaran RT non pangan	703,211	312.735**	44,47
		38	Rata-rata Pengeluaran RT perbulan	1.541.988	672.937**	43,64
18	Peningkatan Akses Kesehatan	39	Angka Usia Harapan Hidup	80,4	67.63**	84%
		40	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	24 per 1.000	9.02 per 1.000	37,58
		41	Angka kematian ibu per 100.000 KH	118 per 100.000	76.2 per 100.000	64,58
		42	Prevalensi Gizi Buruk	≤ 1	0,06	
		43	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk			
			- Puskesmas (30.000)	12,32	1.54	12,5
				1 : 20.759	1:19.435	94.44
			- Pustu (10.000)	123.30	1.25	1,01
				1 : 7.951	1 : 7.950	99.98
			- Poskesdes/Poskestal (3.000)	36.90	1.40	3,79
				1 : 2.072	1 : 2.133	102,9
			44 Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk (10.000)	111.00	22.66	20,41
				1 : 10.000	3.644	274.29

**Angka Dari BPS OKU Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Realisasi
19	Peningkatan Akses Pendidikan	45 Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		- SD	100	101,56%	1,0156
		- SMP	100	96,71	96,71
		- SMA	100	90,95	90,95
		46 Angka Partisipasi Murni (APM)			
		- SD	100	99,97	99,97
		- SMP	100	95,38	95,38
		- SMA	100	89,37	89,37
		47 Angka Kelulusan (AK)			
		- SD	100	96	96
		- SMP	100	97	97
		- SMA	100	90	90
		48 Angka Putus Sekolah	0	1,56	
		49 Angka Melek Huruf	100	99,98	
		50 Rata-rata lamanya Sekolah	9.10	13,14 tahun	
20	Peningkatan Budaya Baca Masyarakat	51 Pengunjung Perpustakaan Daerah perbulan	400	419	105

Sumber :

* Angka dari BPS OKU tahun 2014

**Angka Dari BPS OKU Tahun 2015

***Angka Sangat Sementara dari BPS OKU tahun 2014

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebabsebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2016 yang mana RPJMD Kabupaten OKU Tahun 2016-2021 sedang dalam proses penyusunan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2016. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Peningkatan Akses Pendidikan

Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 5 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan Akses Pendidikan yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

No.	Indikator	Realisasi 2016
1	Angka Partisipasi Kasar	1. SD 101,56 % 2. SLTP 96,71% 3. SLTA 90,95
2	Angka Partisipasi Murni	4. SD 99,97 % 5. SLTP 95,38 % 6. SLTA 89,37 %
3	Angka Putus Sekolah	7. SD 0,55 % 8. SLTP 0,70 % 9. SLTA 0,93 %
4	Rata – rata Lamanya Sekolah	13,14 Tahun
5	Rata - rata Melek Huruf	99,98 %

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar

Rata-rata Angka Partisipasi Kasar untuk SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten OKU sebesar 96 %, artinya hanya 4 % penduduk usia sekolah di Kabupaten OKU yang belum berpartisipasi untuk bersekolah.

2. Angka Partisipasi Murni

Rata-rata Angka Partisipasi Murni untuk SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten OKU sebesar 94 %, artinya tingkat ketepatan waktu bersekolah penduduk.

3. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah untuk SD, SLTP dan SLTA di Kab. OKU sebesar 0,7 %, artinya masih terdapat siswa yang terhenti dalam menempuh pendidikan.

4. Rata-rata Lamanya Sekolah

Rata-rata Lamanya Sekolah di Kab. OKU sebesar 13,14 tahun, artinya masih melebihi ketepatan waktu dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah.

5. Rata-rata Melek Huruf

Rata-rata Melek Huruf di Kab. OKU sebesar 99,98 %, artinya penduduk Kabupaten OKU usia diatas 15 tahun tinggal 0,02 % yang belum mampu membaca dan menulis

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pendidikan
 - ✓ Meningkatnya mutu pendidikan hasil dari kegiatan belajar mengajar
 - ✓ Mutu tenaga pendidik yang handal

- Hambatan/masalah
 - ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sekolah bagi kehidupan
 - ✓ Penyebaran jumlah tenaga pendidik yang masih belum merata
 - ✓ Sarana pendidikan yang belum memadai
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
 - ✓ Pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Kualitas Kelulusan

Terdapat 1 (satu) Indikator untuk mengukur capaian dari Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kelulusan ini yaitu, Angka Kelulusan.

Angka Kelulusan di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2016 yaitu Untuk SD 96 %, SLTA 97 %, SLTA 90 %, artinya masih terdapat siswa yang belum memenuhi nilai untuk kelulusan.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Peningkatan pemahaman siswa dalam menyerap ilmu yang disampaikan pengajar
 - ✓ Penyampaian tenaga pendidik yang dapat diserap oleh siswa
- Hambatan/masalah
 - ✓ Masih rendahnya pemahaman siswa tentang ilmu yang dipelajari
 - ✓ Siswa hanya terfokus kepada nilai yang harus dicapai agar dapat lulus

- Strategi/upaya Pemecahan Masalah

- ✓ Peningkatan mutu tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten
- ✓ Meningkatkan anggaran untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik
- ✓ Meningkatkan pendampingan kepada siswa dalam hal pemahaman ilmu yang diterima

SASARAN STRATEGIS 3
Peningkatan Derajat Kesehatan

Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 4 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan Akses Pendidikan yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator	Realisasi 2016
1	Angka Usia Harapan Hidup	67,63 tahun
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	9.02 per 1.000 KH
3	Angka Kematian Ibu per 100.00 KH	76.2 per 100.000
4	Prevalensi Gizi Buruk	0,06 %

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Bersumber dari BPS OKU, angka usia harapan hidup di Kabupaten OKU mencapai angka 67,63 tahun, artinya rata-rata angka harapan hidup sejak kelahiran di kabupaten OKU baru mencapai angka 67,63 tahun.

2. Angka Kematian Bayi Per 1000 KH

Angka kematian bayi di kabupaten OKU mencapai angka 9,02/1000 KH, terjadi penurunan dari target, artinya tingkat kematian bayi pada saat lahir terjadi penurunan

2. Angka Kematian Ibu Per 100.00 KH

Angka kematian ibu di kabupaten OKU mencapai angka 76,2/100.000 KH, terjadi penurunan dari target, artinya tingkat kematian ibu pada saat lahir terjadi penurunan

4. Prevalensi Gizi Buruk

Angka Prevelansi gizi Buruk di Kabupaten OKU, dari target $\leq 1\%$, tercapai angka 0,06 %.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan ibu menyusui.
 - ✓ Kualitas pelayanan kesehatan yang baik
 - ✓ Meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan serta sosial budaya.
- Hambatan/masalah
 - ✓ Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
 - ✓ Jumlah tenaga kesehatan yang belum mampu menjangkau seluruh masyarakat
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam membantu memantau tumbuh kembang anak di wilayah masing-masing

SASARAN STRATEGIS 4**AKSES KESEHATAN MASYARAKAT**

Untuk mengukur sasaran Keempat ini terdapat 4 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Akses Kesehatan Masyarakat yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016
1	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas (30.000) - Pustu (10.000) - Poskesdes/Poskestal (3000) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1.54 / 1:19.435 - 1.25 / 1:7.950 - 1.40 / 1:2.133
2	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	22.66 / 1.441,15

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

- Capaian Rasio Puskesmas per satuan penduduk 1:19.435 sebesar 94,44 %, artinya cakupan jumlah Puskesmas masih belum merata di seluruh kecamatan
- Capaian Rasio Pustu per satuan penduduk 1:7.950, sebesar 99,98 %, artinya hampir di semua kecamatan memiliki Pustu
- Capaian Rasio Poskesdes/Poskestal per satuan penduduk 1:2.133, sebesar 102,9 % artinya seluruh desa telah memiliki Poskesdes

2. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

Capaian Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk 3.644 sebesar 204,41 %, artinya 1 orang tenaga medis melayani 441 penduduk, atau ada 25 orang tenaga paramedis per 1000 jumlah penduduk

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Peningkatan Akses Kesehatan yang dibantu oleh Program lain seperti PNPM dan bantuan CSR dari Perusahaan yang ada di Kabupaten OKU
- Hambatan/masalah
 - ✓ Penyebaran Penduduk yang tidak merata
 - ✓ Penyebaran tenaga medis yang belum merata
 - ✓ Kondisi wilayah perbukitan dan jarak tempuh dari desa ke puskesmas cukup jauh
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Penambahan jumlah Puskesmas di tiap kecamatan
 - ✓ Peningkatan status tenaga medis yang masih PTT Pusat, PTT Daerah, Honor Daerah yang masih memerlukan pengangkatan sebagai PNS agar pelayanan yang diberikan dapat disertai dengan pertanggungjawaban yang sepadan

SASARAN STRATEGIS 5**MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN**

Untuk mengukur sasaran Kelima ini terdapat 3 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Membangun Ekonomi Kerakyatan yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	75.162
2	Prosentase Koperasi Aktif	99,7 %
4	Jumlah Pasar Tradisional	69

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Capaian Jumlah Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2016 di Kabupaten OKU sebanyak 75.162 unit usaha dari target 5.553 unit usaha di 2015, artinya ada peningkatan sebesar 1328 %

2. Prosentase Koperasi Aktif

Capaian Prosentase Koperasi Aktif pada tahun 2016 di Kabupaten OKU sebesar 99,7%, dari jumlah 377 unit koperasi, terdapat peningkatan 5 unit dari tahun 2015

3. Jumlah Pasar Tradisional

Jumlah Pasar Tradisional pada tahun 2016 di Kabupaten OKU bertambah sebanyak 2 unit dari target 2015, yaitu sebanyak 69 unit.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Terbatasnya lowongan pekerjaan yang mengakibatkan meningkatnya usaha kecil dan mikro, masyarakat beralih ke usaha ekonomi kreatif.

- ✓ Kebutuhan akan pasar tradisional yang dirasakan semakin perlu sebagai sarana jual beli masyarakat
- ✓ Meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat, mengenai lembaga ekonomi yang dirasa tidak memberatkan masyarakat.
- Hambatan/masalah
 - ✓ Belum merata pendirian koperasi di Desa-desa, terkait kurangnya kesadaran
 - ✓ Dukungan dari aparat pemerintah yang belum maksimal terkait pembinaan.
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Peningkatan peran serta pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi
 - ✓ Pemerataan Pendirian Koperasi dengan program-pemerintah.

SASARAN STRATEGIS 6**INFRASTRUKTUR KONDISI BAIK**

Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 3 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Membangun Ekonomi Kerakyatan yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016
1	Rasio Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	70 %
2	Luas Area Sawah yang dialiri Irigasi	880 ha
3	Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Rasio Panjang Kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2016 sebesar 70 % dari ditargetkan 75 %, artinya dari total 1.147.227.km panjang jalan kabupaten, ada 30 % yang mengalami kerusakan.

2. Luas Area Sawah yang dialiri irigasi

Luas Area Sawah yang dialiri Irigasi di tahun 2016 sebesar 880 ha, dari target di 2016 sebesar 1.825 ha, artinya baru sebesar 48,22 % area sawah di Kabupaten OKU yang dialiri irigasi

3. Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih

Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten OKU pada tahun 2016

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Penggunaan Jalan untuk sebagaimana mestinya, tidak dipaksakan pemakaian jalan dilalui oleh kendaraan yang melebihi berat.
 - ✓ Pemeliharaan yang berkesinambungan

- ✓ Sumber air yang memadai, sistem irigasi yang lancar
- Hambatan/masalah
 - ✓ Belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana yang telah dibangun
 - ✓ Kesesuaian waktu panen dan pembangunan irigasi yang terkadang tidak tepat. Pembangunan terkadang terlambat dengan musim tanam yang telah terlebih dahulu mulai.
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Penambahan saluran irigasi baru
 - ✓ Pemerataan pembangunan jalan baru.

SASARAN STRATEGIS 7**PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK**

Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 2 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016
1	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Puskesmas	12 Kecamatan
2	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pasar Lokal	13 Kecamatan

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten OKU berjumlah 18 Unit, ada beberapa Kecamatan yang telah memiliki lebih dari 1 Unit Puskesmas, artinya ada kecamatan yang bahkan belum mempunyai puskesmas atau sudah ada tetapi cakupan layanannya masih belum menyeluruh ke seluruh kecamatan

2. Jumlah Kecamatan yang memiliki Pasar Lokal

Seluruh kecamatan di Kabupaten OKU telah memiliki pasar lokal, tetapi pembangunan secara permanen belum tercapai seluruhnya.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Cakupan layanan Puskesmas untuk seluruh kecamatan
 - ✓ Kebutuhan akan pasar tradisional yang dirasakan semakin perlu sebagai sarana jual beli masyarakat

- Hambatan/masalah
 - ✓ Belum merata pendirian Puskesmas di seluruh kecamatan, mengingat penyebaran penduduk yang tidak merata, juga kondisi wilayah tempat tinggal
 - ✓ Dukungan dari aparat pemerintah yang belum maksimal
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Penambahan Jumlah Puskesmas, khususnya pada kecamatan yang memiliki wilayah yang cukup luas
 - ✓ Pemerataan pembangunan pasar permanen dengan program-pemerintah

SASARAN STRATEGIS 8**PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 2 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016
1	Rasio Penanganan Sampah	
2	Prosentase Perusahaan yang memiliki AMDAL	44 %

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Penanganan Sampah

Rasio Penanganan Sampah di Kabupaten di tahun 2016 sebesar % dari ditargetkan artinya belum memenuhi target

2. Prosentase Perusahaan yang memiliki AMDAL

Dari data di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang termonitoring pelaksanaan AMDAL-nya hanya sebanyak 4 Perusahaan dari total 9 Perusahaan yang terdaftar di Kabupaten OKU

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Kesadaran masyarakat yang meningkat dalam hal pembuangan sampah.
 - ✓ Infrastruktur yang mendukung dalam proses penanganan sampah
 - ✓ Kesadaran dari perusahaan-perusahaan dalam mengelola Amdal

- Hambatan/masalah
 - ✓ Infrastruktur penanganan sampah dan tenaga pengelolaan sampah yang masih sedikit
 - ✓ Ketidakterbukaan perusahaan dalam mengelola Amdal
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Peningkatan Infrastruktur dalam penanganan Sampah
 - ✓ Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang wajib memiliki Amdal, agar dampak lingkungan yang tidak diinginkan tidak terjadi.

SASARAN STRATEGIS 9**PEMERINTAHAN RESPONSIF,
TRANSPARAN , AKUNTABEL**

Untuk mengukur sasaran kesembilan ini terdapat 4 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerintahan Responsif, Transparan dan Akuntabel yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016
1	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peringkat 8
2	Penerapan E- Government	48 %
3	Hasil Penilaian LKjIP	C
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	*dalam proses

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU di tahun 2016, untuk penilaian tahun 2015 mendapat peringkat 8 dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Penerapan e-Government

Penerapan e-Government di Kabupaten OKU baru mencapai 48 %, atau sekitar 25 SKPD dari 52 SKPD di tahun 2016, artinya belum seluruh SKPD di Kabupaten OKU menerapkan e-Government

3. Hasil Penilaian LKjIP

Hasil Penilaian LKjIP tahun 2015 Kabupaten OKU mendapat poin 42,9 atau dengan nilai "C", artinya belum ada kesesuaian antara kinerja dan penganggaran yang dilaksanakan.

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten OKU tahun 2016, sampai saat Laporan ini dibuat masih dalam proses untuk Penilaian

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Pemahaman Data yang dikumpulkan oleh masing-masing SKPD terlaksana dengan baik
 - ✓ Infrastruktur SKPD yang Sudah terkoneksi dengan jaringan e-Government
 - ✓ Kesesuaian data perencanaan (RPJMD, RKPD dan Perjanjian Kinerja) dengan hasil yang dicapai.
 - ✓ Kesesuaian Data Pelaporan Keuangan.
- Hambatan/masalah
 - ✓ Belum meratanya pemahaman SKPD terhadap indikator yang dinilai dalam LPPD
 - ✓ Tenaga/SDM yang belum handal dalam penguasaan Informasi Teknologi (IT)
 - ✓ Proses penyusunan Laporan Kinerja yang sering tidak mengikuti Dokumen Perencanaan.
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Peningkatan peran serta Pimpinan SKPD dalam pengumpulan dan pengolahan Data LPPD
 - ✓ Perlu adanya Bimtek tentang IT
 - ✓ Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Rencana yang telah dibuat.

SASARAN STRATEGIS 10**PELAYANAN PUBLIK YANG
SEMAKIN BAIK**

Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran Pelayanan Publik yang semakin baik yang tersaji pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77,8 %

Uraian Pencapaian Indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Di tahun 2016, target tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten OKU sebesar 75 %, realisasi nya sebesar 77,78 %, artinya ada peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, dan masih ada yang belum merasakan kepuasan terhadap layanan publik

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran
 - ✓ Penyelenggara Pelayanan sudah menjalankan SOP
 - ✓ Penyelenggara Pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan dengan memperhatikan amanat UU Nomor 29 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - ✓ Pemahaman penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan kewajibannya semakin baik dan meningkat.
- Hambatan/masalah
 - ✓ Belum adanya tim survey yang independen, kapabel dan mempunyai kredibilitas
 - ✓ Di tingkat SKPD atau penyedia pelayanan, belum terlalu memahami pelaksanaan survey kepuasan yang sebenarnya wajib untuk

dilaksanakan di SKPD tersebut.

- ✓ Belum ada Tim yang menanggapi pengaduan masyarakat
- Strategi/upaya Pemecahan Masalah
 - ✓ Pemberian pelatihan dan pemahaman yang berkesinambungan bagi penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia pelayanan.
 - ✓ Mempedomani standar baku pelayanan dan standar pelayanan publik
 - ✓ Adanya tim yang benar-benar independen, kapabel dan mempunyai kredibilitas sehingga akan menjamin hasil survey kepuasan masyarakat yang valid dan akuntabel serta mencerminkan gambaran kualitas pelayanan di instansi terkait.

B. Realisasi Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 10 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam IKU dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	Pemerintahan Responsif, Transparan, Akuntabel	1 Ketersediaan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
		2 Penerapan e-Government						
		3 Jumlah Regulasi Partisipasi Publik						
2	Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta	4 Pola Kemitraan						
		5 Jumlah Peraturan yang mendukung Iklim Usaha						
3	Pemerintahan yang Berkualitas, Efektif dan Efisien	6 Hasil Penilaian LKjIP						
		7 Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah			-	-	-	-
4	Pelayanan Publik yang Semakin Baik	8 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik						
5	Infrastruktur Kondisi Baik	9 Rasio Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik						
		10 Luas Area Sawah yang dialiri irigasi						
		11 Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
6	Pembangunan Berwawasan Lingkungan	12	Rasio Penanganan Sampah					
		13	Persentase Perusahaan yang memiliki AMDAL					
7	Peningkatan Sarana Prasarana Publik	14	Jumlah Rambu jalan					
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	15	Jumlah Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	16	Data Profil Desa					
10	Pemerataan Sarana Prasarana Publik	17	Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas					
		18	Jumlah kecamatan yang memiliki Pasar Lokal					
11	Pengembangan Wilayah Perbatasan	19	Prosentase Penetapan Batas					
12	Penanggulangan Kesejahteraan Sosial	20	Angka Kemiskinan			-	-	-
13	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	21	Indeks Pembangunan Manusia			-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
14	Nilai tambah produk unggulan wilayah	22	PDRB (atas dasar harga konstan)			-	-	-
		23	Nilai tambah pertanian			-	-	-
		24	Nilai tambah pertambangan dan energi			-	-	-
		25	Nilai tambah pengolahan			-	-	-
		26	Nilai tambah listrik, gas dan air bersih			-	-	-
		27	Nilai tambah bangunan			-	-	-
		28	Nilai tambah perdagangan, hotel dan restoran			-	-	-
		29	Nilai tambah pengangkutan dan komunikasi			-	-	-
		30	Nilai tambah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan			-	-	-
		31	Nilai tambah jasa-jasa			-	-	-
15	Simpul Perdagangan dan Daya Saing Produk	32	Jumlah Pasar Tradisional					
16	IPTEK untuk Pengelolaan Sumber Daya	33	Jumlah Studi/Penelitian				-	-
		34	Penerapan IPTEK pada usaha ekonomi rakyat					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
17	Ketahanan Pangan, Diversifikasi dan Kesejahteraan Petani	35	Ketersediaan Pangan Utama						
		36	Skor Pola Pangan Harapan						
		37	Pengeluaran RT non pangan						
		38	Rata-rata Pengeluaran RT perbulan						
18	Peningkatan Akses Kesehatan	39	Angka Usia Harapan Hidup				-	-	-
		40	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH						
		41	Angka kematian ibu per 100.000 KH						
		42	Prevalensi Gizi Buruk						
		43	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk						
			- Puskesmas (30.000)						
			- Pustu (10.000)						
			- Poskesdes/Poskestal (3.000)						
		44	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk (10.000)						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
19	Peningkatan Akses Pendidikan	45	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
			- SD						
			- SMP						
			- SMA						
		46	Angka Partisipasi Murni (APM)						
			- SD						
			- SMP						
			- SMA						
		47	Angka Kelulusan (AK)						
			- SD						
			- SMP						
			- SMA						
		48	Angka Putus Sekolah						
		49	Angka Melek Huruf						
		50	Rata-rata lamanya Sekolah						
20	Peningkatan Budaya Baca Masyarakat	51	Pengunjung Perpustakaan Daerah perbulan						

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016, dalam rangka mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing SKPD yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dan lain sebagainya. Pada Tahun 2016, pengukuran kinerja dilakukan terhadap ringkasan/ikhtisar sasaran sebanyak 10 dengan menggunakan 51 Indikator. Dari 51 indikator yang diukur, sebanyak 44 indikator mencapai atau melebihi target 50 %, sebanyak 7 indikator belum mencapai target.

Dalam upaya pencapaian kinerja program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selama kurun waktu 1 tahun, tidak luput pula dari adanya permasalahan dan hambatan. Namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu senantiasa selalu berupaya untuk mencari solusinya. Penanganan permasalahan yang akan dilakukan pada tahun 2016 dan unsur-unsur yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan capaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sehat cerdas, berahklak, profesional, dan berdaya saing melalui upaya penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan peningkatan Usia Harapan Hidup, meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah dan prosentase angka melek huruf;
- 2) Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota melalui upaya peningkatan nilai investasi berskala nasional dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya lokal yang tertib, aman, kreatif, berprestasi, melalui upaya penanganan wanita rawan sosial ekonomi, penanganan tuna wisma, penanganan korban trafficking dalam rumah tangga dan penurunan KDRT, peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan peningkatan jumlah pekerja sosial profesional
- 4) Meningkatkan kinerja pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan melalui upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja serta pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik.
- 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui upaya mengkaji Pelembagaan Sistem intensif fiskal/keuangan (pengurangan pajak dan retribusi daerah dll), mengkaji kerjasama pemerintah daerah dan swasta untuk layanan jasa dan penyediaan barang public terhadap PAD dan mengkaji perwujudan insentif fiskal ke masyarakat.

Akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 ini dan merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021, diharapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik

bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU****INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN OKU
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tahun 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kab. OKU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atas hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Baturaja, 23 Maret 2017

Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu,

**ARI SUSANTO, AK,MM****NIP. 196408271985031002**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)
1	PENDAPATAN			96,11
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			107,07
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah			131,93
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah			91,57
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			106,94
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			99,08
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER			95,19
1 . 2 . 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			94,27
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak			102,21
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			92,96
1 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum			100,00
1 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus			72,23
1 . 2 . 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			100,00
1 . 2 . 2 . 2	Dana Penyesuaian			100,00
1 . 2 . 3	Transfer Pemerintah Provinsi			110,79
1 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			110,79
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			99,06
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah			100,00
1 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya			98,99

2	BELANJA	89,32
2.1	BELANJA OPERASI	89,36
2.1.1	Belanja Pegawai	91,63
2.1.2	Belanja Barang	79,18
2.1.5	Belanja Hibah	89,56
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	99,42
2.2	BELANJA MODAL	89,48
2.2.1	Belanja Tanah	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	78,48
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	82,83
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	93,02
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	68,76
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	13,17
2.3.1	Belanja Tak Terduga	13,17
SURPLUS / (DEFISIT)		(72,23)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	PENERIMAAN DAERAH	100,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00

PENETAPAN KINERJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Akses Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar 2. Angka Partisipasi Murni 3. Angka Putus Sekolah 4. Rata - rata Lamanya Sekolah 5. Rata - rata Melek Huruf	100 % 100 % 0 % 9,10 tahun 100 %
2	Peningkatan Kualitas Kelulusan	Angka Kelulusan	100 %
3	Peningkatan Derajat Kesehatan	1. Angka Usia Harapan Hidup 2. Angka Kematian Bayi Per 1000 KH 3. Angka Kematian Ibu per 1000 KH 4. Prevalensi Gizi Buruk	80,40 tahun 24 per 1.000 kelahiran hidup 118 per 100.000 kelahiran hidup ≤ 1 %
4	Akses Kesehatan Masyarakat	1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk - Puskesmas (30.000) - Poliklinik (3.000) - Pustu (10.000) 2. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk (10.000)	12,32 unit/penduduk 123.30 unit/penduduk 36.90 unit/penduduk 111.00 medis/penduduk
5	Membangun Ekonomi Kerakyatan	1. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 2. Prosentase Koperasi Aktif 3. Jumlah Pasar Tradisional	4,393 unit 99 % 60 unit

6	Infrastruktur Kondisi Baik	1. Rasio Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 2. Luas Area Sawah yang dialiri Irigasi 3. Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	75 % 1,825 ha 30 %
7	Pemerataan Sarana Dan Prasarana Publik	1. Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Puskesmas 2. Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pasar Lokal	13 Kecamatan 6 Kecamatan
8	Pembangunan Berwawasan Lingkungan	1. Rasio Penanganan Sampah 2. Prosentase Perusahaan Yang Memiliki AMDAL	90 % 100 %
9	Pemerintahan Responsif, Transparan , Akuntabel	1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Penerapan E- Government 3. Hasil Penilaian LKjIP 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	1 Peringkat 80 % A WTP
10	Pelayanan Publik Semakin Baik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	75 %

Jumlah Anggaran Tahun 2016 **Rp.**


 Baturaja, Januari 2016
 Pj. BUPATI OKAN KOMERING ULU,

 H. MAULAN AKLIL, S.IP.,M.Si

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa didasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu 2016-2021 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE